

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program nuklir Iran sudah dimulai di masa presiden Shah Reza Pahlevi. Program tersebut merupakan bantuan dari Amerika Serikat melalui program *atom for peace* yang diluncurkan oleh Presiden ke-34 Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower pada tahun 1957. Kerjasama antara kedua negara ini terkait program nuklir Iran pada awalnya berjalan dengan baik sampai terjadi revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Hal tersebut kemudian menyebabkan kerjasama antara kedua negara tersebut juga ikut berakhir¹

Politik luar negeri Iran mengalami perubahan saat pasca Revolusi Islam. Politik luar negeri Iran ini berubah saat Khomeini menjadi salah satu pendiri dari revolusi Iran pada saat itu dan membuat kebijakan luar negeri yang berlaku bagi Iran hingga saat ini. Pada masa Khomeini sudah menstruktur segala kebijakan luar negeri yang didasarkan oleh pemikiran Islam. Dasar ini merupakan konsep yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada dalam tangan ulama yang dapat memimpin warga mayoritas. Namun pemimpin ini lebih diposisikan sebagai penasehat atau sebagai pembimbing. Sedangkan posisi tertinggi tetap berada pada tangan presiden yang dipilih secara demokrasi.²

Program nuklir memiliki sejumlah keuntungan bagi Iran, diantaranya sebagai pertarungan mendatang di tingkat regional dan global berporos pada masalah sumber daya energi. Apabila Iran berhasil mengamankan sumber-sumber daya energinya, maka kemandirian Iran sebagai sebuah negara maupun visi peradaban tidak akan lagi

¹ Bruno, Greg, 2010. Iran's Nuclear Program, *CFR*, <<http://www.cfr.org/iran/irans-nuclear-program/p16811>> di akses pada tanggal 20 Januari 2021

² Shihab, Umar, *Iran (Zomhuri - Ye Islami – ye Iran)*, Abdul Aziz Dahlan(ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2005.

terganggu. Selanjutnya, program nuklir adalah konsensus seluruh rakyat Iran dari semua lapisan dan faksi. Tidak ada yang bisa menolak keuntungan program ini bagi masa depan Iran meskipun dari pesaing politiknya.³

Pada tahun 2003 International Atomic Energy Agency (IAEA) melakukan kunjungan dan meninjau program nuklir Iran. Iran dianggap gagal untuk melakukan perjanjian keamanan dalam program nuklir yang mereka rancang, hal ini dinyatakan oleh IAEA. Dikarenakan Iran menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan desain bangunan dan juga tidak ada laporan mengenai hal yang berhubungan dengan pengolahan serta impor uranium pada IAEA.⁴

Pada tahun 2005 diumumkan bahwa Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden ke-6 Iran. Tekad Iran untuk merencanakan program nuklir Iran akan kembali dilanjutkan dan Iran juga memutuskan untuk kembali meninjau konversi nuklir dan menyatakan bahwa nuklir yang mereka rencanakan untuk kepentingan perdamaian. Pihak dari Amerika mengeluarkan larangan bagi Iran untuk mengembangkan nuklir, dengan dalih jika suatu saat nanti Iran bisa saja mengalihkan energi nuklirnya menjadi terobosan pengembangan senjata yang dapat mengganggu keselamatan dunia dan juga perdamaian yang telah dibangun Iran dengan negara lainnya. Dengan adanya rencana pengembangan teknologi nuklir yang diusung oleh Iran, Amerika-Iran kembali mengalami konflik. Pada saat itu Amerika berhasil menuntut Iran atas rencana pengembangan nuklir tersebut. Aduan kepada PBB guna untuk menghentikan proyek nuklir yang akan dibuat oleh Iran.

Sanksi yang diberikan oleh PBB atas Program Nuklir Iran dijatuhkan pada Tahun 2006 dibawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad setelah mengumumkan dan

³ *Ibid*, hal 159-160.

⁴ Mousavi, Mohammad Ali dan Yasser Norouzi, 2010. Iran-US Nuclear Standoff: A Game Theory Approach, *Iranian Review of Foreign Affairs*, 1 (1), hal. 121 – 152.

menjalankan program pengayaan Uranium yang telah lama berhenti pada masa pemerintahan Muhammad Khatami pada 9 april 2006.⁵

Sanksi yang dijatuhkan kepada Iran di era kepemimpinan Ahmadinejad menjadi lebih berat dibandingkan pada masa pasca revolusi. Hal tersebut ditandai dengan sanksi bersama yang diberikan oleh PBB yang berjumlah Enam Resolusi. Beberapa sanksi tersebut kemudian menyebabkan perekonomian Iran menjadi tidak stabil. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran menimbulkan inflasi sebesar 40% dan membuat perekonomian Iran berjalan lambat. Bahkan nilai Riyal Iran harus anjlok akibat dari berbagai sanksi-sanksi tersebut.⁶

Pada Kepemimpinan Hassan Rouhani kebijakan yang dikeluarkan lebih konstruktif. Hassan Rouhani pada masa kepemimpinannya membuat kebijakan untuk membangun Iran lebih baik. Dibawah kepemimpinan Hassan Rouhani, perekonomian Iran lebih baik dengan melakukan beberapa kesepakatan dengan PBB sehingga beberapa sanksi yang dijatuhkan kepada Iran dicabut dan dapat melakukan kegiatan seperti semula. Salah satu negara yang mencabut sanksi nuklir adalah Rusia yang dimana pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad bekerjasama atas proyek pengiriman udal S-300 yang melibatkan Rusia, namun masalah nuklir pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad sangat kontroversial sehingga mendapat sanksi. Namun pada masa pemerintahan Hassan Rouhani , sanksi tersebut dicabut dan dapat melakukan kembali proyek S-300 dikarenakan Iran telah membuat kesepakatan nuklir.⁷ Di masa awal kepemimpinannya, Ia sangat memprioritaskan hubungan Iran dengan negara- negara

⁵ IAEA didirikan pada 29 Juli 1957 sebagai organisasi internasional yang berupaya mengembangkan standar keselamatan nuklir dan mempromosikan pencapaian dan pemeliharaan tingkat keselamatan yang tinggi dalam aplikasi energi nuklir. (*The IAEA Mission Statement*. Diakses dalam www.iaea.org).

⁶ “Harapan dari Teluk Persia”, <http://nasional.sindonews.com/read/810523/18/harapan-dariteluk-persia-1385518272> di akses pada 20 Januari 2021

⁷ Putin Cabut Larangan Penjualan Sistem Misil S-300 untuk Iran”, http://indonesia.rbth.com/news/2015/04/14/putin_cabut_larangan_penjualan_sistem_misil_s-300_untuk_iran_27451

barat dalam permasalahan nuklir.⁸ Hal ini dapat dibandingkan pada pemerintahan Mahmud Ahmadinejad yang bersikukuh untuk melanjutkan proyek pengembangan Uranium sehingga dapat menyebabkan perselisihan dengan Amerika dan menyebabkan PBB mengeluarkan beberapa sanksi kepada Iran.

Tak hanya itu, setelah banyak sanksi yang dicabut, perusahaan otomotif di Eropa ingin menjalin kerjasama dengan Iran. Hal itu membuat beberapa perusahaan di dunia mau ber-investasi kembali dengan Iran. Sehingga perusahaan otomotif Eropa melaksanakan negosiasi ulang dengan Iran.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi kebijakan pemerintahan Presiden Iran dalam memulihkan perekonomian akibat sanksi yang diberikan oleh PBB atas program nuklir Iran pada tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum untuk memberikan kontribusi terhadap khalayak umum dan akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Bagi akademisi Hubungan Internasional agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar sarjana 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

⁸ <http://indonesian.tribune.ir/ranah/telitik/item/94718-jejak-jejak-negosiasi-nuklir-darijenewa-hingga-lausanne-kedua>

⁹ Iran Mulai Diberi Sanksi Otomotif, <http://oto.detik.com/read/2013/11/29/112956/2427235/1207/iran-mulai-diberikraksasa-otomotif>

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan Presiden Iran Hassan Rouhani dalam memulihkan perekonomian akibat sanksi yang diberikan oleh PBB atas program nuklir Iran .

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini adalah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terhadap penelitian ilmiah tentang Hubungan Internasional bagi khalayak umum dan akademisi. Sedangkan, manfaat penelitian ini secara khusus agar bermanfaat bagi akademisi dan peneliti Hubungan Internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1. Landasan Teori

1.5.1.1 Diplomasi Multilateral

Pada abad ke-19 diplomasi sudah muncul sebelum lahirnya Liga Bangsa-Bangsa, dan pada abad ke-20 Liga Bangsa-Bangsa muncul untuk menjadi upaya lahirnya diplomasi multilateral yang berguna untuk mencegah timbulnya konflik. Pada Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) salah satu contoh diplomasi multilateral yang terbaik. Diplomasi multilateral merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep diplomasi. Diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara merupakan definisi dari diplomasi multilateral. Diplomasi ini kerap berhasil untuk menyelesaikan beberapa konflik dan dalam meningkatkan negosiasi dengan beberapa pihak.¹⁰ Diplomasi multilateral dapat didefinisikan sebagai negosiasi dan diskusi yang memungkinkan tindakan kolektif dan kerja sama antarnegara ataupun aktor non-negara.¹¹ Diplomasi Multilateral muncul juga karena adanya dorongan dari

¹⁰ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 142

¹¹ Langhorne. "The Unique Challenges Presented by Multilateral Diplomacy", *Social Science Research Network*, 2012.

beberapa organisasi internasional sebagai aktor dalam menjalankan diplomasi multilateral. Diplomasi Multilateral merupakan bentuk dari gaya Westphalia lama dan bertujuan untuk mencapai kebebasan dalam melakukan kerjasama multilateral antarnegara dan melalui lembaga internasional.¹²

Karena Iran tidak terbuka dalam permasalahan nuklir ini dan tidak memberikan keterangan yang jelas pada IAEA, membuat Amerika curiga bahwa Iran sedang menutupi program nuklir yang dapat dialihkan menjadi bom nuklir yang dapat membahayakan seluruh penjuru dunia. IAEA membuktikan bahwa Iran sedang menutupi proyek nuklir, sehingga IAEA melapor pada PBB dan Iran mendapatkan sanksi. Setelah selesainya masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad, Hassan Rouhani terpilih menjadi presiden Iran. Hassan Rouhani menyampaikan bahwa Ia ingin memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat agar perekonomian Iran kembali baik serta mencabut sanksi yang dijatuhkan pada Iran. Dengan cara diplomatis, pihak dari Iran kembali membuka perundingan serta membicarakan dengan negara-negara barat untuk menyelesaikan permasalahan nuklir dan serta dapat mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh PBB kepada Iran.¹³

Pada saat pergantian masa pemerintahan di tahun 2013, diharapkan pemimpin yang baru dapat mengatasi masalah yang ada di Iran mengenai masalah embargo dan isolasi ekonomi. Pemimpin Iran pada tahun 2013 adalah Hassan Rouhani yang dikenal sebagai pemimpin yang moderat.¹⁴ Hassan Rouhani dikenal sebagai seorang yang memiliki pendekatan moderat dan hal tersebut ia terapkan pada saat ia menjadi presiden Iran. Saat Hassan Rouhani berpidato dalam forum Sidang Umum PBB ia menunjukkan karakternya yang moderat dengan cara menyampaikan nilai-nilai dan kepentingan Iran tanpa menunjukkan gerakan verbal yang

¹² [https://www.kompasiana.com/mrasyaaditya/550069a7a333115b745109fa/multilateral diplomacy](https://www.kompasiana.com/mrasyaaditya/550069a7a333115b745109fa/multilateral%20diplomacy)

¹³ Rahman, Mushafa Abd. 2003. *Iran Pasca Revolusi, Fenomena Pertarungan kubu Revormis dan Konservatif*. Jakarta. Kompas.

¹⁴ "Menanti Rouhani", http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=13581&type=4#.U1v2p6Kw7IV

menyudutkan pihak tertentu. Contohnya seperti, saat ia tetap menyinggung Israel yang ikut turut campur dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam upaya untuk menjatuhkan Iran.

Hassan rouhani akhirnya mengupayakan negosiasi dan diplomasi multilateral terkait dengan sanksi akibat nuklir. Perundingan di Jenewa Swiss merupakan agenda diplomasi Hassan Rouhani dengan negara P5+1 (Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, Jerman dan Perancis). Perundingan di Jenewa Swiss ini berhasil meyakinkan negara-negara yang bergabung dalam P5+1 dengan syarat Iran harus menghentikan aktivitas atomnya dalam waktu 6 bulan dan juga Iran harus bersedia untuk pemeriksaan dalam program nuklirnya yang akan diperiksa oleh inspektor internasional.¹⁵

Tidak semua negara menyambut pencabutan sanksi yang diberikan oleh Iran dengan antusias, beberapa negara tampak tidak senang bahkan curiga dengan strategi Iran dalam pencabutan sanksi. Israel dan arab Saudi menyambut pencabutan Sanksi tersebut dengan tidak senang, dua negara ini mencurigai bahwa Iran akan semakin bersemangat untuk melanjutkan kembali program pengembangan nuklir yang ada sebelumnya yang sempat terhenti.¹⁶ Iran dicurigai dapat menjadikan nuklir sebagai senjata untuk pembunuhan massal dan akan menguasai seluruh kawasan Timur Tengah.

1.5.1.2 Diplomasi Strategi Ekonomi

Diplomasi ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu aktivitas aktor negara sebagai instrument kerjasama dua arah dalam ekonomi antara pelaku bisnis untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan ekonomi.¹⁷ Diplomasi ekonomi merupakan intergrasi visi transformasi

¹⁵ IAEA Desak Iran Agar Lebih Kooperatif", <http://www.dw.de/iaea-desakiranagarlebih-kooperatif/a-16240539>

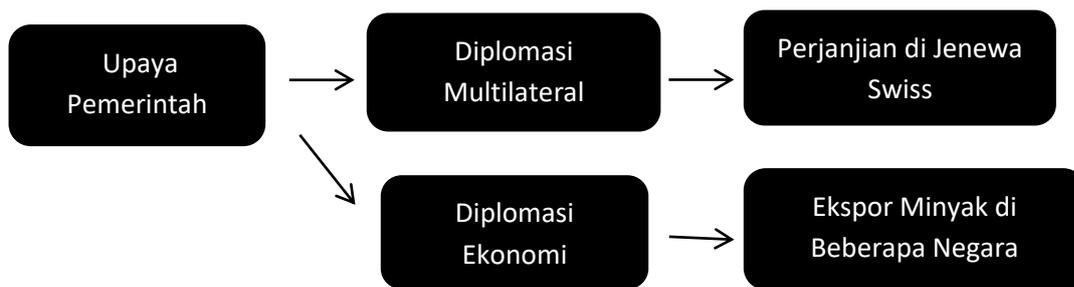
¹⁶ Gulf allies 'back Iran nuclear deal' after US security guarantees", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33758939>

¹⁷ Okano-Heijmans, M. (2011) 'Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies', in Bergeijk, P. A. G. van, Okano-Heijmans, M., and Melissen, J. (eds) *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives*. London: Martinus Nijhoff

nasional sebuah negara dalam pembentukan “nation branding” yang mengarah pada reputasi kompetensi bisnis nasional.¹⁸

Diplomasi ekonomi menjadi alat untuk kemajuan dan perkembangan dalam kedaulatan dunia, karena perdagangan asing menjadi alat reformasi raksasa, dan inflasi dalam pendapatan tahunan. Namun masalah perdagangan yang berasal dari sanksi amerika yang diberikan oleh iran dapat menghambat proses perdagangan, maka dari itu dengan adanya diplomasi ekonomi ini dapat membantu hambatan tersebut dan juga dapat mengeratkan kembali kerjasama perdagangan dengan negara-negara besar dalam jangka yang panjang.¹⁹

1.6 Sintesa Pemikiran



Dari tatanan kerangka teori diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan Iran melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki perekonomian Iran dengan cara melakukan diplomasi atau kerjasama dengan beberapa negara sehingga terciptanya beberapa kesepakatan yang dilakukan di Swiss dan juga melakukan kerjasama secara ekonomi dengan upaya ekspor minyak di beberapa negara yang tergabung dalam kelompok P5+1.

1.7 Argumentasi Utama

Berdasarkan rumusan masalah dan sintesa pemikiran di atas, penulis memiliki argumen utama yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Iran dalam perjanjian di Jenewa Swiss memiliki dampak yang besar terhadap pencabutan sanksi yang ada pada

¹⁸ Reuvers, S. and Ruël, H. (2012) *Research on Commercial Diplomacy: A Review and Implications*. University of Twente. doi: 10.1108/s1877-6361(2012)0000009005.

¹⁹ <https://purnawarta.com/analisa/diplomasi-ekonomi-perhatian-utama-pemerintah-baru-iran/>

masa Mahmoud Ahmadinejad. Iran bernegosiasi dengan negara-negara P5+1 terkait proyek nuklir yang sempat terhenti pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad. Hal tersebut dapat merangkul kembali negara-negara yang sempat mundur dari proyek nuklir serta beberapa sanksi yang pernah didapat Iran pada akhirnya dicabut oleh PBB. Juga mengembalikan aktivitas ekonomi Iran dengan negara lain dan menjalin kerjasama ekonomi terkait dengan ekspor minyak di beberapa negara yang menjadi anggota P5+1.

1.8 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah cara untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu fenomena individual, situasi atau kelompok tertentu dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sederhana namun sistematis tentang fakta-fakta dan karakteristik objek-objek dan subjek yang diteliti secara tepat.²⁰

Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan landasan teori International System dan teori Kebijakan politik dalam menyelesaikan konflik antara Amerika dan Iran akibat pengembangan nuklir yang dilakukan Iran di masa pemerintahan Hassan Rouhani.

1.8.1 Jangkauan Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana kebijakan pemulihan perekonomian Iran Akibat sanksi PBB atas program nuklir Iran tahun 2013. Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini akan dibatasi mulai tahun 2002 sampai dengan 2013. Adapun melebihi dari rentan waktu tersebut hanya sebagai latar belakang dari pemecahan masalah dan penerapan kebijakan dari program nuklir Iran.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam memperoleh data dan informasi tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Adapun teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi

²⁰ Yanuar Ikbar. 2014. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 17.

yaitu, data Sekunder. Pengumpulan melalui data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan.

1.8.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori dan dikaitkan dengan pembahasan yang diteliti kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.²¹

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan tulisannya ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Bagaimana kebijakan Pemerintahan presiden Iran Hassan Rouhani dalam memulihkan perekonomian akibat sanksi yang diberikan oleh PBB atas program nuklir Iran

BAB III

merupakan pembahasan bagaimana Bagaimana kebijakan Pemerintahan presiden Iran Hassan Rouhani dalam memulihkan perekonomian akibat sanksi yang diberikan oleh PBB atas program nuklir Iran dengan menjelaskan strategi diplomasi yang dilakukan oleh Iran.

BAB IV adalah penutup yang mana berisi kesimpulan penelitian serta saran.

²¹ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta. UI Press